

PERAN HUMAS DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI

Oleh
Aan Widiyanto
Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo
aanwidiyanto72@gmail.com

Abstract

Organization is currently experiencing growth and remarkable development. An increasingly diverse public characters, both internal and external, require special handling in communicating to them. Communication activities of the organization is a strategic communications activities that need to be run by the organization. This communication activities involving management as important decision makers in the organization. Through public relations activities of the organization's strategic communication can run well. Public relations must have the full support of management to be able to carry out the task.

Keywords: Public Relations, Autonomy Era

PENDAHULUAN

Pada dasarnya humas hubungan masyarakat dalam istilah ini disebut sebagai manajemen hubungan masyarakat yang mana humas ini sangat di butuhkan dalam organisasi yang fungsinya untuk komunikasi atau pengikat antara organisasi dengan publik/masyarakat baik itu organisasi bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi non komersial.

Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan

warga masyarakat (Baharun, 2017:1-25).

Dalam dunia pendidikan/sekolah tidak terlepas di dalam masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Program sekolah akan semakin berkembang dan lebih maksimal jika mendapat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya bagian humas atau sebagai komunikasi dengan masyarakat yang mana manajemen komunikasi itu di perbaiki sehingga hubungan sekolah dan masyarakat semakin meningkat dan lebih baik lagi kedepannya.

Humas yang sering disebut sebagai penghubung dengan

masyarakat sangat penting sekalam didalam sebuah organisasi. Adapun humas berfungsi dan akan berpengaruh terhadap pngembangan disekolah sesuai tujuan sekolah itu sendiri yang sesuai dengan visi dan misinya sehingga tujuan dalam sekolah tercapai dan semakin meningkat dari segi prestasi siswa dan lainnya. Dengan demikian terciptanya hubungan yang baik sekolah dengan masyarakat akan lebih memudahkan dalam pemberian informasi kepada masyarakat tentang program-prgoram dan masalah-masalah yang dialami, supaya mayarakat bisa tahu dan memahai permasalahan yang ada di sekolah. Dengan adanya kontribusi atau pemikiran dari masyarakat ada timabal balik yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat sehingga sekolah bisa mengevaluasi dengan masukan atau pendapat masyarakat sehingga sekolah menjadi lebih baik dan membuat masyarakat aktif dalam membantu pemikiran terhadap sekolah supaya sekolah akan semakin berkembang dan semakin maju. Keberadaan manajemen

hubungan sekolah dengan masyarakat di lembaga pendidikan sangatlah penting, karena ia adalah bagian dari kegiatan pendidikan dan fungsinya dapat memperlancar semua aktivitas pendidikan (Manaf, 2003:30-40). Manajemen strategi dalam hal ini merupakan suatu seni (keterampilan), tehnik dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan (Baharun, 2016).

OTONOMI PENDIDIKAN

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Otonomi pendidikan adalah sebagai berikut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan

pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Mahmud, 1999:56-64).

Otonomi dalam pendidikan tidak hanya dilakukan pada suatu daerah tertentu saja seperti desa, kecamatan dan kabupaten akan tetapi ini diberlakukan kepada seluruh yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan. Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah di seluruh nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan

alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi masyarakat selama ini. Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten atau pun kotamadya dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan (Baharun, 2012).

Dengan adanya otonomi atau aturan dan wewenang yang telah diberikan sepenuhnya kepada sekolah, maka sekolah harus mampu mengelola lembaga tersebut dan bisa melaksanakan program-program yang telah ada dalam sekolah dengan kemampuan yang ada sehingga semakin berkembang, sekolah bisa mengelola sekolah dengan baik yaitu menyesuaikan dengan lingkungan pada daerah-daerah sekitar yaitu juga harus mengembangkan musyawarah dengan masyarakat sehingga apayang telah direncanakan tercapai (Baharun, 2012).

Oleh karena itu dengan adanya otonomi Pendidikan, Pendidikan adalah sangat penting sekali diadakan peraturan tertentu sehingga jelas dalam suatu pelaksanaan dari

beberapa bidang yang lain. Gelombang demokratisasi dalam pendidikan menuntut adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan, sehingga dari penyamaan pendidikan telah muncul dinusantara uniformitas. Akan tetapi dengan adanya *uniformitas* ini membuat perorangan maupun masyarakat kurang berkembang dalam pendapat-pendapat maupun inovasi. Dengan mengunjungi rumah-rumah dalam rangka memecahkan masalah pendidikan atau membina persahabatan (Sabrina, 2014:89-95). Di tengah-tengah masyarakat sangat besar seperti Indonesia sangat perlu dihargai adanya sisi perbedaan yang tidak mesti seragam, karena keberadaan masyarakat mejemuk itu menuntut untuk adanya berbagai perbedaan yang merangsang untuk tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Dengan terealisasinya otonomi daerah didalam dunia pendidikan ini, bisa dicapai tiga tujuan, seperti yang paparkan oleh Imam Prihadiyoko ketika menjelaskan tentang sekolah dan masyarakat, yaitu: 1. Untuk mendorong melakukan

pemberdayaan masyarakat. 2. Menciptakan kehendak dan kreatifitas. 3. Peningkatan peran serta masyarakat serta dalam rangka pengembangan tugas DPRD.

Desentralisasi pendidikan memasrahkan wewenang kepada sekolah sehingga sekolah mempunyai pegangan dan aturan-aturan tertentu yaitu sebagai otonomi pendidikan/sekolah. Kewenangan tersebut memberikan kepercayaan terhadap sekolah dalam rangka mengelola tatanan sekolah baik mengelola SDM maupun SDA sesuai dengan kemampuan pada daerah tertentu.

Menurut Fantini and Gittel (1973), istilah desentralisasi (decentralization) yaitu dapat diartikan secara ganda (ambiguous), karena dapat diartikan berbeda oleh orang yang berbeda (Freeman, 1983: 17).

Menurut Mowhood (1983) seperti yang telah dipaparkan oleh Agrawal dan Ribot (2000: 3) desentralisasi adalah “sebagai tindakan pemerintah pusat secara formal menyerahkan kekuasaan kepada aktor dan lembaga pada level

yang lebih rendah dalam suatu administratif - politis dan hirarki teritorial”.

Menurut Victoria yang mana telah dijelaskan oleh Freeman (1983:11) “Desentralisasi pada suatu keorganisasian yaitu suatu pemasrahan suatu wewenang dari pusat organisasi ke bagian organisasi yang lain”. Sedangkan menurut Manor, menjelaskan 3 faktor desentralisasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan yaitu *democratic, fiscal, and administrative*, atau menurut Biswanger *politically, fiscal and administrative* yang mana ketiga itu harus dilakukan secara serempak (Agrawal dan Ribot, 2000: 4-5).

PROSES OTONOMI PENDIDIKAN

Otonomi daerah harus bisa melaksanakan pada kemandirian dalam melaksanakan tugas atau wewenang yang telah di berikan, yang mana telah diberi ruang seluas mungkin untuk melaksanakan merancang program yang telah diberikannya sehingga terlaksana sebaik dan ada

campu tangan dengan pihak yang di atasnya yg telah pasrah sepenuhnya. Oleh karena bagaimanapun pengelola harus bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin dengan aturan yang sudah ditentukan. Dengan adanya aturan tersebut daerah harus bisa unjuk gigi dan membuktikan kemampuannya sesuai dengan potensi dan prestasi yang dimiliki, mempunyai kebebasan dalam mengelola sehingga bisa berkreasi dengan kreatif mungkin sehingga menjadi semakin berkembang dan lebih maju lagi. Dengan adanya Otonomidaerah untuk menyamakan persepsi atau sebagai peraturan pemerintahan, yang sesungguhnya tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh daerah dalam mengelola sekolah dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan negara, yang mana upaya tersebut untuk menjalankan tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat semakin lebih baik dan berkembang kedepannya, sehingga tercipta damai, adil, dan sejahtera.

Otonomi dan desentralisasi mengharapkan pelaksanaan yang lebih aktif dan optimalnya sehingga tercipta pengelolaan yang baik dan tercipta suatu pendidikan yang berkualitas. Namun, pada pelaksanaan awal otonomi daerah dan juga meliputi otonomi pendidikan muncul suatu masalah yang merendahkan pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari semakin melemahnya kualitas pendidikan.

Tidak semua daerah memiliki kemampuan SDM dan SDA yang sama. Ada daerah yang memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, lebih-lebih dalam dunia pendidikan. Namun ada juga dalam suatu daerah masih kurang memadai dalam melaksanakan peraturan pendidikan yang telah ditentukan. Oleh karena itu pemerintah belum leluasa memberikan kewenangan yang sepenuhnya. Berdasarkan pengamatan peneliti yang telah didapatkan masih pula tidak memadai dalam melaksanakan otonomi pada dunia pendidikan.

Kondisi Sektor pendidikan yang demikian apabila dilepas khawatir pendidikan daerah semakin lemah. Jika begitu Penurunan itu sekaligus akan sangat berpengaruh terhadap keunggulan pendidikan nasional. Apalagi kalau dilihat komponen aparat pemerintahan di daerah yang ternyata sangat sedikit memiliki latar belakang kualifikasi dalam bidang pendidikan. Jadi sektor pendidikan di daerah tidak semestinya dijadikan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan suatu daerah (Nasution, 2010).

PERAN MASYARAKAT DALAM OTONOMI PENDIDIKAN

Sebelum era otonomi digulirkan, masyarakat tidaklah dapat berbuat banyak untuk perkembangan di daerahnya baik dibidang pemerintahan maupun di bidang pendidikan, bahkan masyarakat hampir sama sekali termarjinalkan. Dalam hal tersebut disebabkan oleh system pemerintahan pada masa itu (fase Soeharto) yang bersifat sentralistik Jakarta, dimana semua kebijakan-kebijakan bermula dari pusat. Pusatlah yang menentukan

baik dan buruknya daerah diseluruh Nusantara ini. Padahal Pemerintah pusat tidaklah mengetahui bagaimana kondisi riil di daerah yang sangat besar sekali. Mulai dari daerah yang sudah maju dan berkembang sampai ke daerah yang terpencil yang kadang-kadang sama sekali tidak terjamahkan oleh pemerintah daerah apalagi pemerintah pusat. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak, mereka hanyalah sebagai patung yang dipermainkan oleh pemerintah pusat. Padahal yang seharusnya lebih mengetahui adalah pemerintah daerah bagaimana kondisi daerah yang sebenarnya. Kini sudah saatnya untuk menata menjadi lebih baik, ketidaksiadilan terhadap masyarakat harus dikikis habis-habis. Pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah pusat dalam mengatur daerahnya.

Selama ini masyarakat sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional apayang telah dilakukan atau sudah ikut serta dan terlihat, dari dukungan materi maupun non matera

(akademik, moral, dan sebagainya), yang didukung oleh lembaga sendiri lembaga pendidikan formal dan non-formal maupun lembaga lain yang mendukung proses pendidikan nasional. Akan tetapi masih terlihat sekali, bahwa masyarakat masih kurang sepenuhnya dukungannya. Hal ini terlihat pada kurangnya partisipasi orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri, dibanding yng sekolah disuwasta (Wahab, 2000:1-10).

Mengingat otonomi dan desentralisasi strategisnya partisipasi masyarakat, maka masyarakat dalam mengkikutin harus dalam semua bentuk atau keseluruhan yang telah di tentukan.

Pertama, keikutsertaan finansial yang di sumbang berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat yang ada, karena dengan adanya dukungan masyarakat lembaga sangat mengapresiasi terkait dengan dukungan tersebut sehingga sekolah tidak kesulitan dalam semua kebutuhan lebih-lebih ketika membutuhkan dana yang sayangat me desak sehingga sekolah mudah

dengan adanya komunikasi atau dukungan dari masyarakat setempat selain itu sekolah bisa mengelola dana-dana tersebut bahkan bisa mewujudkan anggaran pemberian atau dukungan biaya operasional pendidikan.

Kedua, dukungan juga berbentuk material sehingga bisa membantu dalam suatu banunan yang telah di sediakn di sekolah jadi sarana-prasana akan semakin terpenuhi sehingga bangunan dan yang lainnya bisa digunakan dan bermanfaat sehingga proses pembelajaran lebih nyaman efektif dan efesien. Demikian juga masyarakat dimungkinkan dapat mendukung adanya fasilitas umum yang dapat digunakan dalam batas tertentu untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Begitupun sebaliknya masyarakat juga harus mendukung keindahan dan kesehan lingkungan sehingga semuanya berkesinambungan menjadi libih baik sehat dan nyaman.

FUNGSI MANAJEMEN HUMAS

Adapun Beberapa fungsi humas oleh para ahli

Humas Internasional *Cutlip & Centre and Canfield* berdasarkan ciri khas kegiatan humas dalam Rosady Ruslan (2005:19) sebagai berikut:

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama melalui fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi.
2. Membangun hubungan antara badan/organisasi dengan publiknya untuk menciptakan keharmonisan yang sasaran yang sesuai.
3. Mencari masalah dan membenahi sesuatu yang berkaitan dengan opini, pendapat dan pandangan masyarakat kepada organisasi yang dikelola begitupun sebaliknya.
4. Memberi pelayanan yang baik terhadap keinginan publik dan memberi peluang saran.
5. Kepada pemimpin manajemen untuk mencapai tujuan dan manfaat.
6. Menciptakan interaksi yang baik antara publik dan organisasi, sehingga tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Fungsi humas diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat dapat kejelasan dan pemahaman, yaitu praktis humas memberikan informasi-informasi dan komunikasi kepada masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga masyarakat mengetahui keadaan organisasi tersebut dan tidak ada kejanggan ketika ada suatu masalah dapat diselesaikan bersama dengan adanya dukungan dari masyarakat. Dalam dunia pendidikan/Sekolah merupakan sistem terbuka terhadap lingkungan termasuk masyarakat yang menjadi pendukungnya (Umar, 2016:18-29).

Kedua, sebagai humas harus bisa mempengaruhi masyarakat terkait dengan isu-isu yang tidak sesuai, humas bisa meluruskan dan menjelaskan sehingga masyarakat berfikir kehal-hal yang positif, dengan adanya pendekatan ke masyarakat akan menjadi lebih efektif dan dukungan dari masyarakat tetap terjaga dengan sebaik mungkin.

Ketiga, humas harus bisa menjaga jalinan yang sehat dengan masyarakat yaitu bisa menyeimbangkan sikap terhadap masyarakat setempat, seperti apa yang harus dilaksanak dalam sikap keorganisasian dengan adanya sikap yang baik hubungan akan tetap terjaga sebaik mungkin bahkan dukungan masyarakat akan semakin berkembang sehingga organisasi tersebut tidak kebingungan ketika ada masalah atau kekurangan dalam suatu organisasi tersebut apa yang diharapkan oleh lembaga organisasi dan masyarakat akan tercipta sesuai tujuan. Dengan keahlian humas bisa menjalankan sikap dengan masyarakat akan tercipta suatu keharmonisan dan kesejahteraan.

Sedangkan Nasution (2006:28) berpendapat tentang fungsi humas dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

Mampu sebagai media untuk melaksanakan dan untuk mendapatkan informasi-informasi dan komunikasi kepada semua pihak terhadap guru, siswa, dan masyarakat baik secara langsung atau tidak

secara langsung. Dengan adanya komunikasi tersebut akan membantuk dan membangun citra lembaga semakin baik dan semakin dikel oleh publik, dan komunikasi itu akan semakin berkembang dan lebih mudah di akses dan di ketahui oleh seluh publik.

Frida Kusumawati menyebutkan fungsi *public relations* yang dikutip dari Cutlip dan Center, yaitu:

1. Mendukung manajemen humas dalam rangka mencapai tujuan dalam organisasi. Sangat penting bagaimana manajemen memposisikan humas sebagai alat manajemen sangat menentukan output yang dihasilkan oleh humas (Luqman, 2013).
2. Dengan adanya interaksi antara organisasi dan publik maka akan menciptakan jalinan yang lebih harmonis.
3. Memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada publik dengan memberi saran-saran kepada lembaga organisasi
4. Membangun hubungan secara harmoniis antara organisasi dan

publik, baik internal maupun eksternal (Tjipto, 2008:19-67).

PERAN MANAJEMEN HUMAS DALAM PENDIDIKAN

Peranan humas yang dikembangkan oleh *Glen M. Broom* dan *G.D.Smith* dalam buku *Manajemen Isu* oleh Prayudi (2008:18) yaitu dibedakan menjadi dua yakni:

1. Peran Teknisi Komunikasi (*Communication Technician Role*)

“Praktisi humas mempunyai keahlian pada bidang komunikasi danjurnalistik-menulis, pengeditan, produksi audio visual, grafis dan produksi pesan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program humas. Praktisi humas tidak ada kesinambungan dengan pembentukan suatu keputusan dalam organisasi. Praktisi humas yang menjalankan peran ini biasanya memegang peranan penting dalam organisasi yang mengutamakanmodel humas informasi publik atau keagenan pers dimana humas membuat ceklis terhadap media mengenai organisasi.

2. Peran Manajer Komunikasi (*Communication Manager Role*)

Praktisi humas merencana secara sistematis dalam suatu organisasi, untuk memberi wawasan dan kebijakan pada organisasi mengadakan penelitian atau mengevaluasi kerja mereka. Pihak manajemen mengapresiasi dan memberi kepercayaan terhadap humas untuk mengelola sendiri kegiatannya.

Peranan humas menurut *Dozier & Broom* dalam Rosady Ruslan, dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)
2. Praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi untuk dapat membantu mencari solusi yang tepat atas masalah hubungan dengan publik (*public relationship*) yang sedang atau akan dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*)

4. Praktisi humas harus berperan penting sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang menjadi harapan serta keinginan publiknya dan sebaliknya, sehingga dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.

5. Fasilitator Proses Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Process Fasilitator*)

6. Humas untuk membantu pimpinan baik sebagai penasehat (*adviser*) hingga dalam mengatasi persoalan-persoalan secara rasional dan profesional.

7. Teknisi Komunikasi (*Communications Technician*)

8. Dalam hal ini humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyiapkan cara komunikasi atau biasa dikenal dengan *methode of communication in organization*.

Sedangkan humas dalam pendidikan menurut Zulkarnain Nasution, sebagai berikut:

- a. Membina hubungan harmonis kepada publik internal (dalam lingkungan lembaga pendidikan, seperti: dosen/guru, tenaga administrasi dan siswa) dan hubungan komunikasi dengan publik.
 - b. Membina interaksi dua arah kepada publik dan lembaga pendidikan dengan aturan-aturan yang berlaku.
 - c. Mengidentifikasi mencari masalah sehingga bisa diperbaiki pada semua pihak.
 - d. mampu mengapresiasi pendapat masyarakat dan saling mendukung.
 - e. mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam menentukan suatu aturan yang ditetapkan oleh pimpinan.
- b. Humas dalam pendidikan sangat penting untuk menjali hubungan antara sekolah dan masyarakat.
 - c. Humas dalam organisasi pendidikan sebagai penghubung yang baik antara publik *intern*, publik *ekstern* dengan media masasehingga dapat menciptakan dan membangun citra dan reputasi yang positif.

Melalui public relations inilah manajemen organisasi melakukan aktivitas komunikasinya, baik itu kepada publik internal seperti karyawan, manajemen dan publik eksternal seperti masyarakat sekitar dan konsumen. Segala macam informasi yang menyangkut keberadaan dan operasinal organisasi, arus keluar masuknya melalui public relations (Ishak, 2012).

Dari pemaparan di atas peranan humas dalam organisasi pendidikan dapat disimpulkan ialah:

- a. Humas dalam pendidikan sangat penting dalam tugas nya untuk mencarai informasi dan opini sehingga semakin lebih berkembang dalam dunia pendidikan maupun publik.

PERAN HUMAS DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI

Pada dasarnya Hubungan Masyarakat disingkat dengan akronim “humas“, padanan dari istilah *public relation* yang sering

disingkat dengan “PR”. Humas seringkali kita pikirkan sebagai hal yang berhubungan dengan komunikasi, konferensi pers, informasi, secara gampang dimaknai sebagai penyampaian segala informasi.

Peranan humas di lembaga pendidikan (sekolah) adalah menciptakan hubungan internal yang kondusif melalui pemeliharaan setiap ikatan kerja dan menjaga hubungan antara pimpinan, guru, karyawan dan siswa yang harmonis, selain itu untuk menjalin hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen (Baharun, 2017:20). Selain itu, humas di lembaga pendidikan (sekolah) juga mencakup hubungan eksternal, dimana humas di sekolah harus membangun dan mempertahankan citra dan reputasi positif sekolah serta membina hubungan baik dengan media dan menjalin suatu ikatan atau hubungan yang harmonis dengan pelanggan (siswa dan masyarakat luas) agar sekolah tersebut dapat memperoleh kepercayaan publik.

Dalam manajemen humas, prinsip yang dipegang oleh pemimpin, diantaranya: Prinsip *Human Relation*, Prinsip Komunikasi Interpersonal, Prinsip Gaya Partisipatif, Prinsip Persuasif, Prinsip Informatif, Prinsip Membina Hubungan. Langkah-langkah manajemen humas dalam organisasi pendidikan, diantaranya: memberi informasi (*to inform*), Menerangkan (*to explain*), Menyarankan (*to suggest*), Membujuk (*to persuade*), Mengundang (*to invite*), Meyakinkan (*to convince*).

Sebagai praktisi humas harus bisa menjalankan wewenang yang telah diberikan sepenuhnya dengan adanya otonomi pendidikan, yaitu dengan pemikiran-pemikiran dan kreatifitas yang dimiliki sehingga lembaga pendidikan lebih berkembang sesuai dengan kemampuan masyarakat pada daerah sekitar sehingga hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat tercipta harmonis dan sejahtera.

PENUTUP

Peran humas sangat penting dalam mengatur dalam manajemen

pendidikan terkait dengan Otonomi dalam pendidikan tidak hanya dilakukan pada suatu daerah tertentu saja seperti desa, kecamatan dan kabupaten akan tetapi ini diberlakukan kepada seluruh yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan. Dengan adanya otonomi atau aturan dan wewenang yang telah diberikan sepenuhnya kepada sekolah, maka sekolah harus mampu mengelola lembaga tersebut dan bisa melaksanakan program-program yang telah ada dalam sekolah dengan kemampuan yang ada sehingga semakin berkembang, Fungsi humas di Sekolah/Madrasah Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi humas dilembaga pendidikan adalah menumbuh dan mengembangkan hubungan yang harmonis melalui komunikasi dengan menggunakan media antara sekolah dengan publiknya, baik *intern* (dosen/guru, karyawan, mahasiswa/siswa) maupun *ekstern* (orang tua mahasiswa/orang tua siswa, masyarakat, instansi lain) Peran humas di Sekolah/Madrasah Peran Teknisi Komunikasi

(*Communication Technician Role*) Praktisi humas harus dapat berperan sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarapa yang menjadi harapan serta keinginan publiknya dan sebaliknya, sehingga dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhoyo, T E, 'Peran Dan Strategi Humas (Public Relations) Dalam Mempromosikan Produk Perusahaan', *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1 (2013)
- Baharun, H, 'Management Of Quality Education In Pesantren: The Study of the Education Quality Improvement Pesantren by Strategy Management Approach.(2nd International Conferences On Education And Training (Icet), Ed.)', *Malang: UM Malang*, 2016
- Baharun, Hasan, 'Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam', *Jurnal At-Tajdid*, 1 (2012)
- Baharun, Hasan, 'Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala

- Madrasah', *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6 (2017), 1–25
- Drs, Prof, Mohammad Zainuddin, and M Pd, 'Reformasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah', 2015, 1–76
- Hasan Baharun, Zamroni, *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017)
- Ishak, Aswad, 'Peran Public Relations Dalam Komunikasi Organisasi', *Jurnal Komunikasi*, 1 (2012)
- Luqman, Yanuar, 'Peran Dan Posisi Hubungan Masyarakat Sebagai Fungsi Manajemen Perguruan Tinggi Negeri Di Semarang', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2 (2013) <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/5397/4836>>
- Manaf, Abdul, 'Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Pada Sman 7 Kota Banjarmasin', *Management of Education*, 1 (2003), 30–40
- Munirwan Umar, 'Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan', *Edukasi*, 2 (2016), 18–29
- MY, Mahmud, 'Otonomi Pendidikan (Sebuah Tinjauan Terhadap Peran Masyarakat)', 1999, 56–64
- Nasution, Inom, 'Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan', *ISSN 2086 – 1397*, I (2010), 1–9
- Rochmat Wahab, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan', 2000, 1–10
- Sabrina, Shintia, 'Pengelolaan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat (Husemas) Di Sma Negeri 1 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2 (2014), 689–95
- Tjipto, Fandy, 'Strategi Pemasaran', *Yogyakarta: Penerbit ANDI*, 2008, 19–67